

## ABSTRAK

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAM ZONASI JARINGAN PELAYANAN LALU LINTAS JALAN RAYA (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033)**

Oleh : Faidlul Mannan

Dosen Pembimbing Utama : Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya adalah suatu pendekatan holistik yang digunakan dalam perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan lalu lintas di suatu wilayah atau kota. Zonasi menurut KBBI dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya dan Bagaimana pertanggung jawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mencari tahu regulasi yang mengatur tentang zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya dan pertanggungjawaban pemerintah dalam zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Penggunaan lajur khusus juga sering diatur dalam regulasi zonasi jaringan pelayanan lalu lintas. Ini termasuk lajur bus, lajur berbagi (carpool), atau lajur sepeda.

Implementasi sistem zonasi jaringan pelayanan lalu lintas jalan raya membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak serta pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah atau zona yang terlibat. Hanya dengan melakukan upaya bersama dalam merancang, melaksanakan, dan menegakkan regulasi terkait zonasi, kita dapat mencapai tujuan menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci :** Zonasi, Pelayanan, Lalu Lintas.

## ***ABSTRACK***

### **JURIDICAL ANALYSIS OF GOVERNMENT RESPONSIBILITY IN THE ZONING OF HIGHWAY TRAFFIC SERVICE NETWORKS (Judging From Sumenep District Regional Regulations Number 12 Of 2013 Concerning Sumenep District Spatial Planning For 2013-2033)**

*By : Faidlul Mannan*

*Main Supervisor : Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.*

*Assistant Supervisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.*

*Road traffic service network zoning is a holistic approach used in planning, organizing and managing traffic in a region or city. According to the KBBI, zoning is defined as the division or splitting of an area into several parts, in accordance with management functions and objectives. Zoning regulations are provisions that regulate space utilization requirements and control provisions and are prepared for each block or allocation zone where the zoning is determined in a detailed spatial plan.*

*The formulation of the problem of this thesis is: What are the regulations governing the zoning of road traffic service networks and what is the government's responsibility in zoning road traffic service networks. The aim of writing this thesis is to find out the regulations governing the zoning of road traffic service networks and government accountability in zoning road traffic service networks.*

*The research method in writing this thesis is normative using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.*

*The use of khulsuls lanes is also frequently regulated in the zoning regulations of the traffic service network. These include bus lanes, shared lanes (carpool), or selpelda lanes.*

*Implementing a road traffic service network zoning system requires commitment and cooperation from various parties as well as a deep understanding of the characteristics and needs of each region or zone involved. Only by making a concerted effort to design, implement, and enforce zoning regulations can we achieve the goal of creating a better, more sustainable transportation system for society as a whole.*

***Keywords: Zoning, Service, Traffic***